



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RESPONS INDONESIA ATAS ISU PENGGUNAAN PANGKALAN MILITER OLEH RUSIA

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pasca pertemuan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, muncul isu mengenai permintaan izin Rusia untuk menggunakan salah satu pangkalan militer di Indonesia. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak, Papua. Isu ini pertama kali muncul melalui laman pemberitaan media pertahanan Janes pada 14 April 2025.

Pemberitaan itu kemudian memunculkan reaksi dari Australia dan Amerika Serikat (AS). Kedua negara yang tergabung dalam pakta pertahanan AUKUS tersebut khawatir apabila Rusia menempatkan pesawat militernya di Biak, maka aset-aset militer AS dan Australia akan berada dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia, termasuk fasilitas pertahanan AS di Guam, Pasifik Barat. Baik AS dan Australia telah melakukan konfirmasi secara langsung terhadap Indonesia mengenai hal ini. Tidak dapat dipungkiri, pangkalan TNI AU Biak sangat strategis untuk kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara di wilayah Pasifik. Saat Perang Dunia II, pangkalan itu pernah menjadi basis pertahanan tentara Sekutu dalam Perang Pasifik melawan Jepang.

Menanggapi isu yang beredar tersebut, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia sama-sama menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah disebutkan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Rusia pada akhir Februari 2025. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri juga menggarisbawahi bahwa penggunaan pangkalan militer Indonesia oleh negara asing bertentangan dengan kepentingan nasional dan strategi pertahanan negara. Meskipun ada sejarah usulan penggunaan fasilitas militer Indonesia untuk kepentingan logistik atau pemeliharaan oleh pihak asing, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memperkuat kemandirian pertahanan nasional melalui modernisasi dan peningkatan kemampuan militer dalam negeri.

Sikap tegas pemerintah menunjukkan komitmen politik luar negeri bebas aktif yang tidak terikat dan bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia berisiko menarik negara kita ke dalam dinamika geopolitik yang bertentangan dengan upaya menjaga perdamaian global. Di samping itu, prioritas utama Indonesia adalah melindungi kepentingan nasional, bukan terlibat dalam konflik yang bisa memperuncing ketegangan antara kekuatan besar dunia.

Kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan pembukaan ruang untuk penggunaan pangkalan militer merupakan dua hal yang berbeda. Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer untuk tujuan apapun di Indonesia. Namun, komitmen tersebut bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap kerjasama militer, karena pada prinsipnya negara kepulauan tetap dapat mengizinkan pesawat dan kapal militer negara lain (*military innocent passage*) sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban,

dan keamanan serta dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional. Sehingga, kerja sama militer Indonesia dengan negara lain tidak akan menjangkau pembinaan pangkalan militer asing di tanah air. Sebagai catatan, pada tahun 2017 militer Indonesia dan Rusia pernah melaksanakan latihan bersama berupa patroli pesawat bomber di pangkalan TNI AU Biak dalam konteks kerja sama pengumpulan intelijen pada kerangka kerja sama pertahanan bilateral.

Atensi DPR

Dalam konteks geopolitik global yang terus berubah, Indonesia perlu berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan berbagai negara. Langkah yang kurang tepat dalam melakukan pendekatan pertahanan dapat berdampak pada potensi instabilitas. Isu mengenai penggunaan pangkalan militer di Biak oleh Rusia sempat menimbulkan kegaduhan dalam politik internasional. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat menghimbau Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk saling bersinergi memastikan kebijakan kerja sama pertahanan sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Komisi I juga dapat mendorong Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri tetap memprioritaskan kepentingan nasional tanpa mencederai kepentingan strategis dalam kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Sumber

cnbcindonesia.com, 18 April 2025;
cnnindonesia.com, 15 April 2025;
detik.com, 16 April 2025;
kompas.com, 16 dan 17 April 2025;
metrotvnews.com, 18 April 2025; dan
tempo.co, 16, 17, dan 18 April 2025.

Minggu ke-3 April
(14 s.d. 20 April 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*